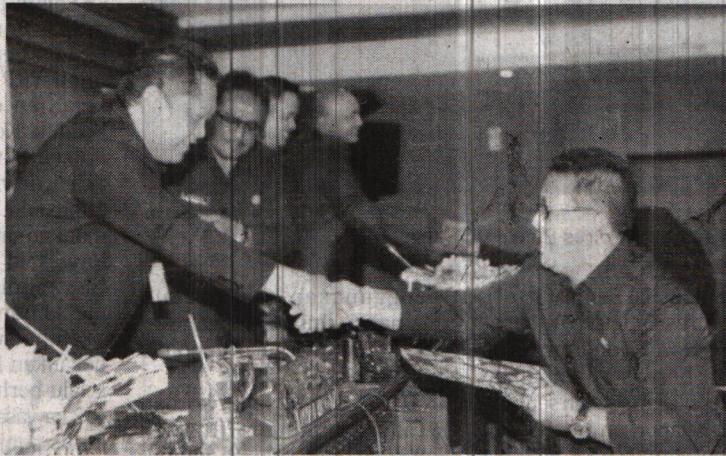




Walikota Rai Mantra Sampaikan Ranperda Perubahan APBD 2016



WALIKOTA Denpasar IB Rai Mantra (kiri) saat Rapat Paripurna, Senin (18/7).

DENPASAR, NusaBali

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2016 setelah perubahan dirancang Rp 2,05 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp 38,70 miliar lebih dibandingkan anggaran induk sebesar Rp 2,01 triliun lebih. Hal tersebut dikemukakan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra saat menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016, dalam rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (18/7) di Ruang Pertemuan Gedung Sewaka Dharma, Denpasar.

Lebih lanjut Walikota menjelaskan, sejumlah pos pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah dirancang meningkat Rp 24,91 miliar lebih dari anggaran Induk Rp

715,45 miliar lebih sehingga target Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan menjadi Rp 740 miliar lebih. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dirancang sebesar Rp. 1.081 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp 5,66 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 1,987 triliun lebih. Sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi dirancang sebesar Rp 230,75 miliar lebih meningkat sebesar Rp 19,45 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 211,30 miliar lebih.

Dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 2,26 triliun lebih meningkat Rp 143,76 miliar lebih

dibandingkan anggaran induk sebesar Rp 2,12 triliun lebih.

Walikota Rai Mantra juga menjelaskan belanja tidak langsung tersebut tidak hanya untuk belanja pegawai saja, tetapi juga untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dirancang sebesar Rp 1,26 triliun lebih mengalami peningkatan sebesar Rp 20,41 miliar lebih dibandingkan anggaran induk sebesar Rp 1,24 triliun lebih. Demikian juga untuk belanja hibah dalam mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat dirancang sebesar Rp 53,09 miliar lebih dimana mengalami peningkatan sebesar Rp 19 miliar dari anggaran induk sebesar Rp 34,09 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja pada anggaran perubahan tersebut dirancang menurun sebesar Rp 6,07 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 991,17 miliar lebih menjadi Rp 985,09 miliar lebih.

Untuk rincian belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dirancang meningkat Rp 123,35 miliar lebih sehingga menjadi Rp 1,00 triliun dari anggaran induk sebesar Rp 884,94 miliar lebih.

Diakhir penyampaian pidatonya Rai Mantra berharap ada koreksi yang konstruktif sehingga apa yang dirumuskan akan memberi hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan di Kota Denpasar.@

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016

Hal : 3



Lagi, Tunda Tahan 3 Mantan Direksi PDAM

I Nyoman Nuka memohon penundaan eksekusi karena masih ada upacara keagamaan.

GIANYAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar memberikan kebijakan kepada tiga mantan direksi PDAM Gianyar. Mereka yakni Dewa Putu Djati (mantan Direktur Utama) PDAM, Dewa Nyoman Putra (mantan Direktur Umum),

dan I Nyoman Nuka (mantan Direktur Teknik) terkait eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA).

Kebijakan itu yakni, rencananya tiga mantan direksi itu dieksekusi untuk ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Gianyar, Red), sejak Senin (18/7). Namun ditunda sepekan hingga Senin (25/7) nanti. Kebijakan ini dikeluarkan karena salah satunya, Nyoman Nuka, mohon penundaan eksekusi.

Senin (18/7), Kasi Intel Kejari Gianyar I Ketut Sudirta menjelaskan, pemanggilan tiga mantan direksi itu sebelumnya, Senin (11/7), hanya dihadiri Dewa Nyoman Putra dan Dewa Putu

Djati. Sedangkan, pemanggilan Senin (18/7) ketiga mantan direksi PDAM ini hadir di Kejari Gianyar. "Namun dalam kesempatan itu, I Nyoman Nuka memohon penundaan eksekusi hingga seminggu kedepan karena masih ada upacara keagamaan," jelasnya.

Ketiga mantan direksi PDAM diterima oleh Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gianyar Herdian Rahadi sekitar pukul 09.00 Wita. Permohonan penundaan eksekusi akhirnya diterima dan akan dilaksanakan minggu depan. "Minggu depan pasti dilaksanakan, lengkap tidak lengkap eksekusi tetap dilaksanakan," tegas Ketut Sudirta.

Kata dia, ketiganya sudah membuat surat pernyataan dan berjanji datang tanpa surat pemanggilan lagi pada pekan depan.

Sebagaimana diketahui, putusan MA menimbang pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah dan ditambah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor; jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Selain hukuman penjara, ketiga terdakwa juga dikenakan pidana tambahan yaitu denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Tiga mantan direksi PDAM ini menjadi terpidana setelah kalah dalam kasasi yang dilakukan Kejari Gianyar di tingkat MA. Di Pengadilan Tipikor Denpasar, kasusnya dimenangkan oleh ketiganya. Sedangkan MA mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dewa Putu Djati terkena hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan sedangkan Dewa Nyoman Putra dan Nyoman Nuka dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara plus ganti rugi senilai yang sama. Mereka tersangkut kasus korupsi proyek DED (detail engineering design) Rp 200 juta milik PDAM Gianyar. **cr6**

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016

Hal : 6



Giliran Perwakilan Fraksi Diperiksa

★ Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Denpasar

Pemeriksaan terhadap sejumlah perwakilan fraksi ini terkait dengan kasus dugaan Perdin DPRD Kota Denpasar yang sudah menetapkan satu tersangka

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar melakukan pemeriksaan 7 saksi dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar, Senin (18/7). Dari 7 saksi yang diperiksa, 4 di antaranya merupakan perwakilan fraksi di DPRD Kota Denpasar.

Tujuh saksi yang diperiksa, yaitu Ketut Nuada (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Demokrat), I Putu Oka Mahendra (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Golkar), I Nyoman Tamayasa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Indonesia Raya), Kadek Agus Arya Wibawa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi PDIP), I Made Kayun (Direktur Bali Travel Daksina), Gede Sutiawan (manajer marketing Bali Travel Daksina) dan IB Putu Sudhayantana (travel Sunda Duta).

"Ada dua saksi yang tidak hadir dalam pemeriksaan, yaitu Kadek Agus Arya Wibawa (Fraksi PDIP) dan IB Putu Sudhayantana (travel Sunda Duta)," ujar Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, Syahrir Sagir saat ditemui di sela pemeriksaan.

Saksi-saksi ini diperiksa secara bergiliran sejak pukul 13.00 Wita dan masih berlangsung hingga pukul 18.00 Wita.

Syahrir mengatakan pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan Perdin DPRD Kota Denpasar yang sudah menetapkan satu tersangka, yaitu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berinisial AAP. Terkait pemeriksaan anggota fraksi DPRD Kota Denpasar, Syahrir mengatakan karena anggota dewan inilah yang mengikuti perjalanan dinas. "Mereka ditanya apa saja yang didapat selama perjalanan dinas, proses dan hal lainnya terkait perjalanan dinas yang selama ini mereka ikuti," tegasnya.

Saat disinggung penambahan tersangka dalam kasus ini, Syahrir mengiyakan. Bahkan dipastikan dalam waktu dekat akan ada penambahan tersangka dari Sekertariat DPRD Kota Denpasar. "Kita tunggu saja. Siapa yang terlibat pasti akan kami proses," tegas Kasi Intel yang sudah 1 tahun 10 bulan menjabat ini.

Untuk kerugian negara, Syahrir menyebut cukup besar.

Awalnya penghitungan kejaksaan tidak sampai Rp 1 miliar. Namun, setelah ada hasil audit BPK Perwakilan Bali, ternyata kerugian negara membengkak tiga kali lipat dari penghitungan awal kejaksaan. Didesak angka kerugian, Syahrir menyebut angkanya cukup besar. "Hasil audit BPK sudah ada, cuma secara resmi belum. Perhitungan kerugian kami kecil tidak sampai Rp 1 miliar, ternyata setelah diaudit BPK tiga kali lipat," pungkas Syahrir.

Dalam kasus ini, penyidik awalnya meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yang dilakukan SKPD Pemkot Denpasar dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Denpasar pada 2013 lalu. Pemeriksaan ini berdasarkan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta.

Dari petunjuk awal inilah, penyidik ternyata sudah berhasil mengembangkan kasus ini. Penyelidikan yang awalnya hanya fokus di satu perjalanan dinas saja mengembang menjadi seluruh perjalanan dinas yang dilakukan tahun 2013 lalu. Dari hasil penyelidikan ini ditemukan beberapa penyimpangan dalam perjalanan dinas yang dilakukan DPRD Denpasar selama satu tahun. Bahkan disebutkan ada kerugian negara miliaran rupiah dalam kasus ini.  rez

Edisi : Selasa, 19 Juli 2016

Hal : 5



Dana ADD Dipangkas, Perbekel Mengeluh

**62 desa jatah
ADDnya dipangkas
karena kebijakan
rasionalisasi
anggaran.**

SINGARAJA, NusaBali

Sejumlah perbekel di Buleleng mengeluhkan pemangkasan jatah alokasi dana desa (ADD) pada pertengahan 2016. Padahal, jatah ADD tersebut telah diprogram dalam APBDes 2016 untuk membiayai pelbagai kegiatan.

Informasi di Buleleng, memasuki APBD Perubahan 2016, Pemkab Buleleng akan merasionalisasi anggaran. Langkah itu juga menyentuh dana ADD bagi seluruh desa. Beberapa desa, jatah ADDnya ikut

dipangkas dengan kisaran antara Rp 30 juta - Rp 100 juta lebih. Di lain sisi, ada beberapa desa lain malah ada penambahan pagu ADD hingga Rp 100 juta lebih.

Bagi desa yang jatah ADDnya dipangkas maka timbullah persoalan baru. "Bagaimana kami bisa mewujudkan program kalau seperti ini (pemangkasan dana ADD, Red). Kami sudah sosialisasikan kegiatan, tiba-tiba tidak terlaksana, ini kan bisa menimbulkan persoalan baru di bawah," ujar perbekel yang minta namanya dirahasiakan.

Data dihimpun, di Buleleng terdapat 134 desa. Dari jumlah desa itu, 62 desa yang jatah ADDnya dipangkas karena kebijakan rasionalisasi anggaran. Sisanya, 72 desa jatah ADD mereka bertambah.

Ketua Forkomdeslu Kabupaten Buleleng Made Suteja, dikonfirmasi Senin (18/7), tidak menampik ada pemangkasan jatah ADD. Ia juga tidak menampik ada keluhan dari para perbekel yang jatah ADD mereka dipangkas. Namun, bagi Suteja persoalan itu muncul karena kurangnya sosialisasi ke bawah. "Ya memang ada keluhan dari para perbekel. Sebenarnya ini bisa diantisipasi sebelumnya jika ada sosialisasi lebih awal. Persoalannya kan, sosialisasi belum ada, tiba-tiba pagu ADD itu dikurangi," kata Suteja yang juga Perbekel Desa Dencarik, Kecamatan Banjar ini.

Suteja mengungkapkan, pihaknya telah meminta penjelasan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), dan SKPD terkait

atas pemangkasan jatah ADD tersebut. Dalam pertemuan itu, hampir seluruh perbekel bisa menerima penjelasan dari SKPD terkait. "Tadi (Senin kemarin, red), kami dengan pengurus Forkom kecamatan dan pihak kecamatan sudah bertemu dengan BPMPD dan BPKAD, sudah dijelaskan alasan penurunan itu. Dan kami hanya bisa menerima keputusan tersebut," ungkapnya.

Kepala BPMPD I Gede Sandhiyasa yang dikonfirmasi terpisah, membenarkan ada pertemuan dengan pihak Forkomdeslu terkait dengan penurunan jatah ADD. Dikatakan, pengurangan jatah ADD itu karena ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali yang menegaskan agar pemberian jatah ADD bagi masing-masing desa mengacu pada data

kemiskinan hasil pendataan dari Pemkab sendiri. Semula pemberian jatah ADD itu mengacu pada data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Akibat saran tersebut, Pemkab Buleleng juga merubah Peraturan Bupati (Perbup) dari 106 Tahun 2016 menjadi Perbup 403 Tahun 2016 tentang perubahan alokasi keuangan pemerintahan desa. "Kebijakan ini karena petunjuk BPK Perwakilan Bali dan sejatinya secara keseluruhan total ADD untuk seluruh desa itu tetap dan hanya perubahan pola pembagiannya yang dirubah," tegasnya.

Disinggung program kegiatan akibat jatah ADD dipangkas, Sandhiyasa menegaskan, program itu ditunda di tahun 2016, dan akan menjadi prioritas pada tahun 2017. **k19**